

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan masalah pada bab sebelumnya serta data yang diperoleh, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya pembaharuan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kota Jambi yang mempunyai proses alur uang persediaan ini yang dilakukan melalui :
 - a) Pengisian Form SPP-UP yang dilakukan oleh Bendahara
 - b) Lanjut proses pengisian Form SPM-UP dilakukan oleh PPK serta
 - c) Pencairan dana non-tunai Pada Kantor BPKAD
 - d) Dan terakhir melakukan Pencatatan Buku Kas Umum (BKU) untuk melakukan Pencairan Dana secara tunai yang dilakukan oleh Perbendaharaan dalam setiap perangkat daerah dengan menggunakan Aplikasi SIPD.
2. Sistem ini masih belum sempurna dan terdapat kendala dan telah menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam perangkat daerah terutama dalam penggunaan Pencatatan Uang Persediaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kota Jambi ini yang dilakukan oleh perbendaharaan adanya beberapa yang berjalan dengan baik, sehingga selebihnya menggunakan sistem manual yaitu Ms. Excel dalam sistem pencatatan dan masih dalam proses pengembangan sehingga harus menunggu persetujuan dan pengembangan aplikasi tersebut dari Kemendagri dalam mencapai suatu sasaran kegiatan yang diinginkan.

4.2 Saran

Setelah menyusun laporan keuangan mengenai pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Jambi, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai penunjang dalam Pengelolaan Penatausahaan Keuangan diharapkan sistem informasi berbasis komputer ini tidak selalu terjadi kendala dalam jaringan komputer, sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut agar mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik dan memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi
2. Dalam pembaharuan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini yang memiliki kendala hanya bisa menjalankan aplikasi lain sebagai pendamping dalam proses penatausahaan untuk menghindari *human error* yang terjadi (Terlalu tinggi seperti tidak terkontrol ataupun kas bocor).